



Peran Stakeholder dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Binaan di LPKA Kelas I Tangerang

Harits Rabburafief¹, Irvan Sebastian Iskandar²

Politeknik Ilmu Pemasaran, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: haritsqaz@gmail.com¹, irvan.sebastian@poltekip.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The implementation of educational quality standards in Juvenile Correctional Institutions (LPKA) in Indonesia has not yet fully aligned with legal mandates, creating challenges in ensuring the educational rights of incarcerated youth. Limited qualified teachers, inadequate facilities, and restricted technical and financial support contribute to this situation. This study aims to examine the roles and contributions of stakeholders in improving educational quality at LPKA Class I Tangerang. The research applied a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, focusing on the involvement of both internal and external stakeholders. The findings indicate that government policies and budget support play a significant role in strengthening educational services within the institution. Teacher professional development programs improve instructional quality. Collaboration with universities and industry partners provides vocational training opportunities for students. Effective coordination between institutional leaders and school management also enhances educational governance. The study concludes that sustained collaboration and active engagement among stakeholders are essential to achieving high-quality and sustainable education for youth in LPKA.

Keywords: Stakeholders, Educational Quality, LPKA, Collaboration.

ABSTRAK

Pelaksanaan standar mutu pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas yang belum memadai, serta dukungan teknis dan anggaran yang terbatas menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kontribusi para stakeholder dalam meningkatkan mutu pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang berfokus pada keterlibatan pihak internal maupun eksternal lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan dukungan anggaran berperan penting dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan di LPKA. Program peningkatan kompetensi guru turut berdampak pada kualitas proses pembelajaran. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia industri membuka peluang pelatihan keterampilan bagi anak binaan. Koordinasi antara pimpinan LPKA dan pihak sekolah juga mendukung pengelolaan pendidikan yang lebih terarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang konsisten dan

keterlibatan aktif seluruh stakeholder menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan bagi anak binaan.

Kata Kunci: Stakeholder, Mutu Pendidikan, LPKA, Kolaborasi.

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus yang memegang peran utama dalam menentukan arah pembangunan bangsa di masa mendatang. Karena itu, negara berkewajiban memastikan seluruh hak anak terpenuhi, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan tidak sekadar menjadi media penyampaian pengetahuan, melainkan juga sarana pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai moral, serta pengembangan kemampuan sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, pemenuhan hak atas pendidikan menjadi semakin krusial. Mereka berada dalam kondisi yang rentan dan membutuhkan perhatian serta perlindungan khusus agar tetap dapat berkembang secara optimal, meskipun sedang menghadapi proses hukum (Halawa and Mulyanti 2023).

Berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 tercatat sebanyak 2.304 kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Dari jumlah tersebut, kasus pencurian menempati posisi tertinggi dengan 838 perkara, disusul tindak pidana narkoba sebanyak 341 kasus. Angka ini memperlihatkan bahwa anak masih rentan terjerumus dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum, terutama pada jenis kejahatan yang berkaitan dengan faktor ekonomi dan penyalahgunaan zat terlarang. Di sisi lain, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak binaan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 tercatat 2.058 anak, kemudian meningkat menjadi 2.493 anak pada tahun 2022. Hingga Februari 2024, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum masih mencapai 2.078 orang. Dari total tersebut, sebanyak 1.251 anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Akmal 2021).

Table 1. Jumlah Anak Binaan

Penempatan	Jumlah
LPKA	1251
Lapas	220
Rutan	80
LPP	12

Data ini mengindikasikan bahwa persoalan anak yang berhadapan dengan hukum masih menjadi tantangan serius. Dalam situasi tersebut, sistem pembinaan di LPKA memegang peranan krusial. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani masa pembinaan, LPKA juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan pendidikan yang memadai. Pendidikan di dalam lembaga tersebut menjadi salah satu instrumen utama untuk mendukung proses rehabilitasi, membangun kembali kepercayaan diri anak, serta mempersiapkan mereka agar dapat kembali dan diterima di tengah masyarakat dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik.

Secara hukum, hak anak binaan untuk memperoleh pendidikan telah dijamin dengan jelas dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa meskipun seorang anak sedang menjalani proses hukum atau pembinaan, haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, dan tanpa perlakuan diskriminatif tetap melekat dan tidak dapat dihapuskan. Namun faktanya, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan norma yang telah diatur. Tidak seluruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak mampu menyelenggarakan pendidikan formal secara terstruktur sebagaimana sekolah pada umumnya. Keterbatasan sarana, tenaga pendidik, serta dukungan anggaran menjadi beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Akibatnya, sebagian besar LPKA lebih mengandalkan jalur pendidikan nonformal melalui program Kejar Paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau lembaga mitra lainnya (Widyaningtyas and Subroto 2023).

Sejumlah kajian sebelumnya menunjukkan bahwa mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang mendukung, kapasitas dan profesionalitas tenaga pendidik, serta kerja sama yang solid antar lembaga terkait. (Yasin, Selfiana, and Mas'ud 2024) menekankan bahwa pendekatan kualitatif memiliki peran penting untuk memahami secara mendalam dinamika sosial yang terjadi di dalam lembaga pembinaan, termasuk relasi, pola interaksi, dan budaya institusional yang berkembang di dalamnya. (Kadarisman 2019) mengemukakan bahwa pelayanan publik akan berjalan lebih efektif apabila terdapat koordinasi yang terarah dan pembagian peran yang jelas di antara para pemangku kepentingan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa keberhasilan suatu program, termasuk layanan pendidikan, sangat bergantung pada sinergi antar pihak yang terlibat. Penelitian (Fonataba 2025) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kerja sama yang terintegrasi antara institusi pemerintah, lembaga pendidikan, dan unsur masyarakat dinilai mampu memperkuat sistem yang ada. Sementara itu, (Taryanto and Pramono 2026) menyatakan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki daya saing di kancah internasional. Artinya, kualitas pendidikan yang baik menjadi prasyarat penting bagi daya saing bangsa di masa depan.

Secara umum, kajian mengenai peningkatan mutu pendidikan menunjukkan kecenderungan kuat pada pentingnya tata kelola kelembagaan, efektivitas koordinasi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut menempatkan sinergi lintas sektor sebagai elemen kunci dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan. Namun, dalam pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, fokus penelitian masih didominasi oleh aspek yuridis dan pembinaan secara umum. Dimensi manajerial pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pemetaan peran, mekanisme koordinasi, dan pola kolaborasi antar pihak di lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, belum banyak dikaji secara mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa studi mengenai manajemen pendidikan berbasis kolaborasi di LPKA masih memiliki ruang pengembangan.

Maka, penelitian ini menempatkan diri pada upaya untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis komprehensif terhadap peran pemangku kepentingan, faktor pendukung dan penghambat, serta pola kerja sama dalam peningkatan mutu pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, persoalan utama dalam penelitian ini adalah belum tersusunnya gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana peran para pemangku kepentingan dijalankan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. Peran tersebut belum dipetakan secara jelas, sehingga kontribusi masing-masing pihak dalam proses peningkatan mutu pendidikan belum terlihat secara utuh. Di samping itu, langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk memperkuat layanan pendidikan juga belum terdokumentasi dan teridentifikasi secara sistematis. Begitu pula dengan faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaannya, yang masih memerlukan penelaahan lebih mendalam. Pola koordinasi serta pembagian tanggung jawab antar pihak yang terlibat pun belum tergambar secara tegas, sehingga menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran para pemangku kepentingan, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta menelaah pola kolaborasi antar pihak dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam bagaimana manajemen pendidikan berbasis kolaborasi dijalankan dalam situasi nyata di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Melalui studi kasus, peneliti dapat menelaah secara rinci peran para pemangku kepentingan, pola koordinasi yang terbentuk, serta bentuk kerja sama yang berlangsung dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan bagi anak binaan. Penelitian dilaksanakan di LPKA Kelas I Tangerang. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik khusus, yakni telah menyelenggarakan pendidikan formal di dalam lingkungan pembinaan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMK, hingga program PKBM. Kondisi tersebut menjadikan LPKA Kelas I Tangerang relevan dan representatif untuk mengkaji praktik kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Artinya, seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti di lapangan. Peneliti terlibat dalam kegiatan observasi, melakukan wawancara mendalam, serta mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di LPKA. Selama proses penelitian berlangsung, prinsip etika tetap dijaga, termasuk menjaga kerahasiaan identitas informan dan memastikan kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Subjek penelitian terdiri atas para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang. Informan dipilih secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki peran dan pengetahuan yang relevan dengan

fokus penelitian. Informan tersebut mencakup stakeholder kunci seperti pihak Dinas Pendidikan, Kepala LPKA, Kepala Sekolah, dan Kepala Seksi Pembinaan. Selain itu, terdapat stakeholder primer yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, yaitu guru, pegawai LPKA, serta anak binaan sebagai peserta didik. Penelitian ini juga melibatkan stakeholder sekunder, seperti orang tua, mitra industri, serta instansi pendidikan eksternal yang bekerja sama dengan LPKA. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, wawancara mendalam dengan pola semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pandangan, serta peran masing-masing pihak dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Kedua, observasi partisipatif untuk melihat secara langsung proses pembelajaran dan dinamika interaksi yang terjadi di lingkungan LPKA. Ketiga, studi dokumentasi terhadap berbagai kebijakan, kurikulum, laporan kegiatan, dan arsip lembaga yang relevan. Penggunaan beragam teknik ini bertujuan untuk saling melengkapi dan memperkuat keabsahan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Proses analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Tahapan tersebut tidak berjalan secara linier, melainkan berlangsung secara berulang dan saling berkaitan hingga diperoleh pemahaman yang utuh dan konsisten mengenai fenomena yang diteliti. Untuk memastikan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teknik, melakukan konfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan (member checking), serta melakukan diskusi dengan sejawat guna menjaga konsistensi dan ketepatan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang berada di Jl. Daan Mogot No. 29 C, Tangerang, Banten, dengan luas lahan sekitar 12.150 m². Bangunan ini awalnya didirikan pada tahun 1925 pada masa kolonial Hindia Belanda sebagai Lapas Anak Pria Tangerang. Pada tahun 1945, fungsi lembaga sempat dialihkan menjadi markas militer, kemudian dikelola oleh jawatan kepenjaraan antara 1957 hingga 1961, dan akhirnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 1964. Saat ini, LPKA Kelas I Tangerang berperan sebagai pusat pembinaan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan penekanan pada rehabilitasi dan pendidikan sebagai upaya mempersiapkan mereka untuk kembali dan beradaptasi di masyarakat.

LPKA Kelas I Tangerang memiliki tujuan untuk menjadi lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan layanan bagi anak-anak yang sedang menjalani proses hukum. Pendekatan lembaga ini menekankan kombinasi antara rehabilitasi, pendidikan, dan pengembangan karakter anak binaan. Misinya mencakup beberapa fokus utama, yakni menegakkan hukum sekaligus menjamin hak anak, mengembangkan sistem pemasyarakatan berbasis teknologi, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembinaan, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas, serta meninjau dan mengevaluasi program-program pembinaan secara berkala. Pada dasarnya, visi dan misi LPKA berfungsi sebagai

pedoman dalam merancang program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan sosial, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembinaan anak binaan.

Dalam pelaksanaannya, LPKA menawarkan beragam program pembinaan. Pendidikan formal diselenggarakan mulai dari tingkat SD, SMP, SMK, hingga program Kejar Paket Bimbingan Masyarakat (PKBM). Selain itu, lembaga ini menyediakan pendidikan keagamaan melalui Pondok Pesantren, pelatihan keterampilan seperti komputer, menjahit, las, dan otomotif, serta kegiatan olahraga, seni, kerohanian, dan layanan kesehatan serta sosial. Semua program tersebut dirancang untuk mendukung pengembangan karakter, keterampilan, dan kesejahteraan anak binaan secara menyeluruh, sehingga mereka siap menghadapi kehidupan setelah masa pembinaan.

Berdasarkan data per April 2023, jumlah anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang tercatat sebanyak 111 orang. Distribusi anak binaan menurut tingkat pendidikan dan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2. Jumlah Anak Binaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Rentang Usia	Jumlah Anak
1	SD	12-18	7
2	SMP	13-15	30
3	SMK	16-18	32
4	PKBM	12-18	42
Jumlah			111

1. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan kerangka Project Stakeholder Management dari PMI, yang mencakup tahap identifikasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan keterlibatan masing-masing pihak.

a. Identifikasi dan Pemetaan Stakeholder

Stakeholder di LPKA terbagi menjadi pihak internal dan eksternal. Pihak internal terdiri dari Kalapas, Kasi Pembinaan, pegawai LPKA, dan anak binaan. Sedangkan pihak eksternal mencakup Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, mitra program vokasional seperti Ahass Motor, serta instansi pendidikan pendukung lainnya. Pemetaan ini membantu memahami posisi, pengaruh, dan keterlibatan masing-masing stakeholder dalam mendukung program pendidikan di LPKA.

Table 3. Identifikasi dan Analisis Stakeholder

Stakeholder	Peran	Interest	Power	Strategi
Dinas Pendidikan	Sebagai regulator dan pengawas	5	5	Kelola Secara Intensif
Kalapas	Otoritas tertinggi di LPKA	5	5	Kelola Secara Intensif

Kepala Sekolah	Pengelola kegiatan akademik	5	4	Kelola Secara Intensif
Kasi Pembinaan	Perancang program pembinaan	4	4	Kelola Secara Intensif
Instansi Pendidikan Eksternal	Memberikan dukungan akademik & sertifikasi	4	3	Tetap Diberi Informasi
Guru dan Tenaga Pengajar	Menyampaikan materi pendidikan	4	3	Tetap Diberi Informasi
Ahass Motor	Mitra pelatihan keterampilan	4	3	Tetap Diberi Informasi
Pegawai LPKA	Menjaga keamanan dan ketertiban	3	3	Tetap Diberi Informasi
Orang Tua Siswa	Memberikan dukungan emosional	4	2	Tetap Diberi Informasi
Siswa (Anak Binaan)	Penerima utama program pendidikan	5	2	Tetap Diberi Informasi

Stakeholder kemudian dipetakan ke dalam matriks Power/Interest, yang terbagi menjadi empat kuadran:

- 1) Kelola Secara Intensif (High Power, High Interest): Dinas Pendidikan, Kalapas, Kepala Sekolah, Kasi Pembinaan.
 - 2) Tetap Diberi Informasi (Low Power, High Interest): Instansi Pendidikan Eksternal, Guru, Ahass Motor, Pegawai LPKA, Orang Tua, Anak Binaan.
 - 3) Tetap Puaskan (High Power, Low Interest): tidak ada.
 - 4) Pantau (Low Power, Low Interest): tidak ada.
- b. Perencanaan Keterlibatan Stakeholder

Tahap perencanaan keterlibatan bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan saat ini dan menentukan target keterlibatan yang diharapkan bagi setiap stakeholder.

Table 4. Matriks Penilaian Keterlibatan Stakeholder LPKA

Stakeholder	Unaware	Resistant	Neutral	Supportive	Leading
Dinas Pendidikan				C	D
Kalapas				C	D
Kepala Sekolah				C	D

Kasi		
Pembinaan	C	D
Pegawai		
LPKA	C	D
Guru	C	D
Siswa		
(Anak	C	D
Binaan)		
Orang Tua		
Siswa	C	D
Ahass		
Motor	C	D
Instansi		
Pendidikan	C	D
Eksternal		

Hasil analisis menunjukkan bahwa, seluruh tingkat keterlibatan yang diinginkan masih lebih tinggi dibandingkan kondisi saat ini. Pemangku kepentingan utama, seperti Dinas Pendidikan, Kepala Seksi Pembinaan, dan para guru, ditargetkan untuk bergerak dari peran mendukung (Supportive) menjadi peran pemimpin (Leading) dalam pelaksanaan program. Sementara itu, pegawai LPKA, siswa, dan orang tua diharapkan mengalami peningkatan keterlibatan, dari posisi netral (Neutral) menjadi lebih mendukung (Supportive). Temuan ini menekankan penerapan strategi komunikasi dan kerja sama yang lebih terarah dan intensif. Pendekatan tersebut diperlukan agar semua pihak dapat berpartisipasi secara optimal, sehingga tujuan peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai secara efektif.

2. Faktor Penghambat Pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam empat aspek, yaitu tenaga pengajar, kondisi anak binaan, kurikulum dan sarana-prasarana, serta peran pemerintah dan orang tua.

a. Faktor Tenaga Pengajar dan Guru

1) Keterbatasan Guru Profesional

Mayoritas pengajar di LPKA merupakan pegawai lembaga yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal (S.Pd). Hal ini berdampak pada kualitas pengajaran dan efektivitas penyampaian materi pembelajaran yang belum optimal.

2) Beban Kerja Ganda

Guru yang juga menjalankan tugas administratif dan keamanan menghadapi kesulitan membagi waktu antara mengajar dan tanggung jawab lain. Akibatnya, persiapan dan pelaksanaan pembelajaran menjadi kurang maksimal.

3) Insentif yang Terbatas

Pemberian insentif bagi guru, terutama guru sukarelawan, masih sangat terbatas. Aturan yang membatasi pemberian insentif bagi guru yang mengajar di lebih dari satu jenjang turut menurunkan motivasi dan kemampuan mempertahankan guru berkualitas.

b. Faktor Kondisi Anak Binaan

1) Motivasi Belajar Rendah

Banyak anak binaan telah lama putus sekolah dan berasal dari keluarga dengan perhatian rendah terhadap pendidikan. Kondisi ini membuat mereka kurang termotivasi, kurang menyadari pentingnya belajar, bahkan cenderung apatis terhadap perlengkapan dan aktivitas sekolah.

2) Kesulitan Melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Formal

Stigma sosial dan batasan usia menyebabkan lulusan LPKA sulit diterima di sekolah umum. Alternatif yang tersedia hanya melanjutkan ke PKBM atau memasuki dunia kerja.

3) Pengaruh Lingkungan Sebaya

Lingkungan asrama memungkinkan anak dengan motivasi rendah memengaruhi teman sebayanya untuk bersikap apatis. Hal ini menciptakan suasana belajar yang kurang kondusif.

c. Faktor Kurikulum dan Sarana-Prasarana

1) Kurikulum Kurang Relevan

Penerapan kurikulum nasional (Kurikulum Merdeka dan K-13) menemui kendala karena minimnya tenaga pengajar untuk mata pelajaran tertentu, seperti IPA dan program kejuruan. Upaya pengajuan kurikulum khusus yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak binaan masih terhambat respons dari Dinas Pendidikan.

2) Keterbatasan Sarana dan Fasilitas

Ketiadaan fasilitas praktik, seperti laboratorium IPA dan komputer, membatasi pengembangan pengetahuan dan keterampilan praktis siswa. Hal ini sangat terasa pada jenjang SMK yang membutuhkan peralatan sesuai standar industri.

d. Faktor Pemerintah dan Orang Tua

1) Hambatan Regulasi Terkait Status Tanah

Lahan LPKA dimiliki Kementerian Hukum dan HAM, sehingga status sekolah menjadi swasta. Hal ini menimbulkan kendala administratif dalam pengajuan bantuan fasilitas pendidikan dari Dinas Pendidikan, yang mensyaratkan kepemilikan lahan sendiri.

2) Kurangnya Dukungan Orang Tua

Rendahnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak terlihat dari ketidakpatuhan dalam mengurus administrasi penting, seperti pemutakhiran data Dapodik. Kondisi ini menyebabkan anak binaan kesulitan mengikuti ujian dan memperoleh sertifikasi resmi.

3. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang

Menghadapi berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak binaan, pihak manajemen LPKA Kelas I Tangerang bersama para pemangku kepentingan telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. Upaya-upaya ini dilakukan secara holistik, melibatkan berbagai aspek mulai dari penguatan dukungan eksternal hingga pengembangan kapasitas internal lembaga.

Dukungan dari pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Provinsi Banten, menjadi fondasi utama yang memungkinkan pendidikan di

LPKA dapat berjalan. Bantuan finansial berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak binaan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nunik Royani, Kepala Sekolah SD Istimewa, *"Nah kita kan mendapatkan dana BOS. Itu peruntukannya untuk anak-anak. Segala fasilitas anak-anak lah di sini. Contohnya kayak seragam sekolah dan lain-lain. Karena kan mereka memang kita sediakan semua. Dari mulai seragam sekolah, sepatu, alat tulis, dan lain-lain. Termasuk sarana dan prasarana kayak kursi meja dan lain-lain."* Di tingkat SMP, dukungan ini semakin lengkap dengan adanya dana BOP dari Pemerintah Kota Tangerang yang memungkinkan sekolah menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh siswa. Ibu Rita, Kepala Sekolah SMP Istimewa, menambahkan, *"Alhamdulillah sih kalau di kota ini kita dibantu juga dengan dana, kalau BOS itu kan dana dari pusat ada juga kita dana BOP... kalau BOP itu dari kota Tangerang, maksudnya dari Dinas Kota karena syarat untuk dapat dana BOP itu sekolah yang berani menggratiskan biaya sekolahnya kepada siswanya."* Selain bantuan finansial, pengawasan dan pendampingan rutin dari pengawas Dinas Pendidikan juga memastikan standar kualitas tetap terjaga. Ibu Rita menjelaskan, *"Alhamdulillah sih kalo sejauh ini masih dipermudah kalo ngurus, yang penting komunikasinya ada. Dan mereka juga kan udah tau kalo karena kebetulan ini Pak kepala Dinas Pendidikannya itu sudah lama kenal dengan kita, jadi dia sudah paham lah situasi di sini itu seperti apa... Kalau di sini monitoring, misalnya ada kegiatan ujian atau kegiatan UNBK, atau ada kegiatan lainnya, pengawas sering ke sini."*

Kepemimpinan Kepala LPKA, Ibu Setyo Pratiwi, terbukti menjadi kunci dalam mendorong berbagai inisiatif peningkatan mutu. Beliau secara aktif mengalokasikan dana DIPAK untuk memberikan honor bagi guru tidak tetap, sebuah langkah yang sangat diapresiasi oleh para tenaga pengajar. Ibu Setyo Pratiwi mengungkapkan, *"Bersyukur mulai tahun kemarin guru tidak tetap kita berikan honor dari DIPAK. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih bisa memberikan honor kepada guru tidak tetap."* Hal ini dibenarkan oleh Ibu Rita, *"Oh iya, kalau untuk internalnya sih, sekarang, ya alhamdulillah sih, Bu Kalapas ada perhatiannya. Yang tadinya tahun-tahun dulu, guru honor atau guru sukarelawan dari luar belum ada insentifnya, sekarang udah ada. Ya terus, Bu Kalapas sih selalu support, misalkan ada tamu atau ada keluhan kita atau ada apa, Bu Kalapas selalu mendukung."* Bahkan, Kepala LPKA juga memfasilitasi pengembangan kompetensi guru dengan menjalin kerjasama bersama Indonesia Heritage Foundation untuk memberikan pelatihan pedagogik, terutama bagi guru yang berasal dari pegawai LPKA. Beliau menjelaskan, *"Saya menjalin kerja sama dengan Indonesia Heritage Foundation, yang mengadakan pelatihan untuk tenaga kependidikan... salah satunya adalah memberikan bekal pengetahuan pedagogik untuk tenaga pendidik kita terutama yang berasal dari pegawai LPKA."* Dalam membangun jejaring eksternal, Kepala LPKA aktif menjalin kerjasama dengan universitas seperti Trisakti dan IPB untuk menerima mahasiswa magang yang membantu kegiatan pendidikan. *"Selain itu kami juga banyak menerima mahasiswa-mahasiswa yang mau melakukan penelitian di sini, jadi mereka kami ikut sertakan dalam kegiatan pembinaan dan pendidikan anak,"* ujarnya. Kerjasama dengan industri juga dilakukan, seperti dengan AHASS Motor untuk program vokasional, sebagaimana dikonfirmasi oleh Bapak Sukantos, Kepala SMK Istimewa, *"Karena kita jurusan teknik sepeda motor, otomatis kita mencari kerja sama"*

yang berkaitan dengan sepeda motor... dengan PT Wahana Makmur Sejati Astra Honda Motor." Komunikasi efektif yang dibangun dengan Dinas Pendidikan juga memperlancar proses pengajuan bantuan dan penyelesaian masalah.

Peningkatan kinerja guru juga menjadi perhatian serius melalui berbagai pelatihan profesional. Ibu Hanida, Guru SD dan SMK Istimewa, menuturkan, "Kebetulan juga kita di sekolah dari MKKS SMK atau dari UPTD SD, kita ada pelatihan-pelatihan mengajar seperti kurikulum K-13, jadi seiring berjalannya waktu dari kepala LPKA pun memfasilitasi untuk guru-guru belajar lagi gimana cara mengajar." Dukungan kepemimpinan yang responsif terhadap keluhan dan kebutuhan guru turut menciptakan iklim kerja yang positif. Ibu Rita menegaskan, "Kalau ada tamu atau ada keluhan kita atau ada apa, Bu Kalapas selalu mendukung. Terus, maksudnya, selain mendukung juga mencari solusi."

Dalam hal kurikulum, LPKA berupaya meningkatkan relevansinya dengan kondisi anak binaan. Penerapan Kurikulum Merdeka dilakukan secara fleksibel dengan berbagai penyesuaian. Ibu Nunik menjelaskan, "Kami menggunakan kurikulum yang merdeka, kami masih belajar juga dengan kurikulum baru, belum bisa persis seperti di luar. Menyesuaikan lah. Tapi sudah kami sampaikan juga ke pengawas yang bertanggung jawab mengenai hambatan yang kami hadapi dalam menjalankan kurikulum." Di SMK Istimewa, kemitraan dengan industri seperti AHASS memungkinkan penerapan kurikulum berbasis industri. Bapak Sukantos menambahkan, "Untuk kurikulum yang kita pakai di SMK Istimewa sekarang ini ada dua kurikulum, yang pertama kurikulum revisi, dan untuk kelas baru sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka." Monitoring eksternal juga dilakukan melalui keterlibatan pengawas Dinas Pendidikan dan penguji eksternal dalam uji kompetensi untuk memastikan kualitas dan pengakuan atas hasil pendidikan. "Untuk penguji itu ada penguji internal dan eksternal. Dari Dinas Pendidikan juga dilihat dulu apakah kita layak melaksanakan uji kompetensi," jelas Bapak Sukantos.

Membangun motivasi belajar anak binaan menjadi langkah awal yang krusial dalam proses pendidikan. Ibu Hanida menekankan, "Ketika saya masuk kelas, yang pertama-tama dibangun itu motivasi belajar mereka dulu. Bahwa pendidikan itu penting buat masa depan mereka." Pendidikan karakter juga diintegrasikan dalam proses pembelajaran untuk membentuk kepribadian positif. Program vokasional dan penyaluran kerja melalui kerjasama dengan AHASS memberikan peluang nyata bagi lulusan. Bapak Sukantos mengungkapkan, "Siswa-siswa kita ini terdata di database Honda... Jadi untuk menampung kerja mereka sudah ada data, dan mereka juga bisa menjadi alumni AHASS... tahun lalu ada 3 orang yang ke Ahass." Bahkan bagi anak yang telah bebas, LPKA memberikan arahan agar mereka tetap dapat mengikuti ujian guna mendapatkan ijazah. "Anak yang sudah bebas diarahkan untuk ikut ujian agar mendapatkan ijazah," ujar Ibu Rita.

Budaya dan iklim organisasi yang mendukung juga turut memperkuat penyelenggaraan pendidikan di LPKA. Kolaborasi lintas bagian, terutama antara bagian pendidikan dan keamanan, berjalan dengan baik. Ibu Rita mencontohkan, "Kalau ada acara-acara, biasanya kita kerjasama sama bagian keamanan." Monitoring eksternal dari Dinas Pendidikan juga berperan menjaga akuntabilitas dan memberikan motivasi bagi tenaga pendidik.

Upaya peningkatan dukungan orang tua dan masyarakat terus dilakukan. LPKA aktif dalam Forum PKBM Kota Tangerang sebagai wadah komunikasi dan advokasi dengan Dinas Pendidikan. Ibu Sutari, Kepala Sekolah PKBM Istimewa, menjelaskan, *"Kalau kerjasama, mungkin banyak deh. Maksudnya... Kerjasama bidang informasi atau apa, itu kita dengan Forum. Forum PKBM sekota Tangerang. Kita ada komunitasnya. Jadi, itu sebagai prasarana komunikasi kita ke dinas, melalui Forum."* Pihak LPKA juga secara aktif mengingatkan dan mengedukasi orang tua tentang pentingnya pengurusan administrasi pendidikan anak. Ibu Sutari menambahkan, *"Kadang-kadang memang orang tua kurang peduli, tapi setelah diingatkan oleh pihak LPKA, banyak juga yang mulai mengurus berkas-berkas yang diperlukan."* Hal ini penting mengingat masih banyak orang tua yang kurang peduli, seperti diungkapkan Bapak Sukantos, *"Dari orang tua, kurangnya kepedulian dalam pengurusan berkas administrasi... jadi kadang-kadang setelah anak itu masuk LPKA, saat kita mau tarik datanya, masih nyangkut di sekolah induknya atau sekolah yang lama."* Kemitraan dengan pihak eksternal seperti AHASS Motor tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan praktis, tetapi juga membuka peluang kerja bagi lulusan, sehingga menjadi bentuk dukungan nyata dari masyarakat dan dunia industri.

Pembahasan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa LPKA Kelas I Tangerang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan bagi anak binaan, meskipun lembaga ini menghadapi berbagai kendala. Analisis pemangku kepentingan menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan sangat bergantung pada keterlibatan aktif baik dari pihak internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan tinggi, seperti Dinas Pendidikan, Kepala LPKA, Kepala Sekolah, dan Kasi Pembinaan, memegang peran kunci dalam menentukan mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip Project Stakeholder Management dari PMI, yang menekankan pentingnya pengelolaan intensif terhadap pihak utama untuk mencapai tujuan program.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas internal melalui pelatihan guru, pemberian insentif, serta pengembangan jejaring dengan universitas dan pihak industri merupakan faktor utama yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia (human capital) menjadi kunci utama dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di lembaga pemasyarakatan anak (Permana, Anam, and Sahroni 2025). Inisiatif Kepala LPKA dalam menyediakan pelatihan pedagogik, program magang, serta pembinaan keterampilan vokasional menunjukkan pendekatan menyeluruh yang memadukan pendidikan formal dengan pengembangan keterampilan praktis, sejalan dengan konsep rehabilitative education yang bertujuan mempersiapkan anak binaan agar dapat kembali berintegrasi secara sosial (KMK, Hardhienata, and M.Si 2024).

Di sisi lain, penelitian menemukan sejumlah kendala, antara lain terbatasnya jumlah guru profesional, rendahnya motivasi belajar anak binaan, kurangnya sarana praktik, serta dukungan orang tua yang minim. Hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya tantangan struktural dan sosial yang memengaruhi efektivitas

program pendidikan. Misalnya, motivasi belajar anak yang rendah kerap dipengaruhi oleh tekanan dan pengaruh lingkungan sebaya, sejalan dengan teori social learning yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam lingkungannya (Wijayanto 2025). Selain itu, keterbatasan fasilitas praktik di SMK mengurangi kesempatan anak binaan memperoleh keterampilan sesuai standar industri, sehingga dibutuhkan penyesuaian kurikulum dan peningkatan sarana untuk meningkatkan relevansi pendidikan.

Upaya peningkatan mutu pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang menunjukkan integrasi antara pendekatan administratif, pedagogik, dan sosial. Dukungan pendanaan melalui BOS dan BOP, pengawasan dari Dinas Pendidikan, serta kerjasama dengan pihak industri dan universitas menunjukkan penerapan strategi manajemen pemangku kepentingan yang efektif untuk memastikan keberlanjutan program. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyoroti pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar lembaga untuk mencapai efektivitas pendidikan rehabilitatif di lembaga pemasyarakatan anak (Anami and Simanjuntak 2025).

Selain itu, penggabungan pendidikan karakter, upaya meningkatkan motivasi belajar, serta penyelenggaraan program vokasional mencerminkan penerapan pendekatan whole child education, yang menekankan pengembangan anak secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan sosial, emosional, dan keterampilan praktis anak. Bahkan, pendekatan ini mendorong pembentukan tanggung jawab pribadi, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan hidup yang relevan, sehingga anak binaan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan di luar lembaga dan berkontribusi positif bagi masyarakat (Wardaya 2024). Penggabungan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta pembinaan karakter, LPKA mempersiapkan anak binaan agar mampu kembali berperan aktif dan berkontribusi di masyarakat setelah menjalani masa pembinaan.

Pada dasarnya, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan di LPKA tidak hanya bergantung pada fasilitas dan tenaga pengajar, tetapi juga pada koordinasi antar pemangku kepentingan, pengembangan kapasitas internal, serta integrasi program pendidikan formal, vokasional, dan karakter. Tantangan yang ada menjadi dasar rekomendasi untuk meningkatkan dukungan regulasi, memperluas sarana pendidikan, serta meningkatkan motivasi anak dan keterlibatan orang tua, sehingga tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan di LPKA Kelas I Tangerang memiliki peran yang sangat menentukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak binaan. Pemerintah, melalui Dinas Pendidikan, berperan menyediakan dukungan kebijakan dan pendanaan, sementara Kepala LPKA bertugas memfasilitasi sarana dan infrastruktur serta menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pendidikan dan perusahaan. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam pengelolaan kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar, sedangkan guru, baik yang

berasal dari internal lembaga maupun sukarelawan, memegang peranan sentral dalam mendidik anak binaan. Walaupun keterlibatan masyarakat dan orang tua masih terbatas, mereka tetap memberikan dukungan administratif yang penting bagi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di LPKA. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan mutu pendidikan antara lain adanya dukungan dana dari BOS dan BOP, kerja sama dengan mitra eksternal seperti AHASS Motor, serta inisiatif Kepala LPKA dan kepala sekolah dalam memberikan insentif kepada tenaga pengajar. Di sisi lain, sejumlah kendala masih menjadi tantangan, termasuk keterbatasan jumlah guru profesional, rendahnya motivasi belajar anak binaan, keterlibatan orang tua yang minim, serta hambatan regulasi terkait status tanah di bawah Kemenkumham yang mempersulit pengadaan fasilitas dan bantuan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di LPKA Kelas I Tangerang. Bagi pihak internal LPKA, penting untuk memperkuat kerja sama antar-unit dalam lembaga agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif bagi anak binaan. Kepala LPKA bersama kepala sekolah sebaiknya secara proaktif menjalin koordinasi dengan pemerintah untuk memperoleh dukungan tambahan, khususnya terkait penyediaan fasilitas, pelatihan bagi tenaga pengajar, dan pemberian insentif bagi guru sukarelawan. Selain itu, pengembangan sistem insentif yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung tenaga pengajar internal maupun eksternal agar mampu menghadapi tantangan khusus dalam pendidikan anak binaan. Kepala sekolah dan tenaga pengajar juga dianjurkan secara rutin meninjau dan memperbarui kurikulum agar selaras dengan kebutuhan pembinaan dan penguatan karakter, serta mengintegrasikan pendidikan formal dengan program pengembangan karakter dan metode pengajaran adaptif untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Bagi pihak eksternal, pemerintah dan Dinas Pendidikan diharapkan dapat memberikan dukungan regulasi yang lebih fleksibel serta menyediakan guru profesional bersertifikat yang siap mengajar di LPKA. Prosedur terkait status tanah sekolah di bawah Kemenkumham perlu disederhanakan agar akses terhadap bantuan fasilitas pendidikan menjadi lebih mudah. Selain itu, pelatihan khusus bagi guru LPKA sangat diperlukan agar tenaga pendidik siap menghadapi kebutuhan khusus anak binaan. Masyarakat, komunitas, dan sektor swasta juga diharapkan dapat lebih aktif berperan mendukung program pendidikan melalui penyediaan pelatihan keterampilan, program mentoring, dan sumber daya lainnya yang menunjang keberhasilan pendidikan di lembaga tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Akmal, Denara. 2021. "Analisis Pengukuran Kinerja UMKM Dengan Model Performance Prism: Kasus Pada All Star Futsal Padang." *ABIS: ACCOUNTING AND BUSINESS INFORMATION SYSTEMS JOURNAL Yapedumeau: Universitas Gadjah Mada* 9(2). <https://www.academia.edu/download/107899985/31266.pdf>.
- Anami, Salmaa Sekar, and Meitisa Vanya Simanjuntak. 2025. "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus

- Anak Kelas I Blitar." *Journal of Mental Health and Social Rehabilitation* 3(2):47–58.
- Fonataba, Josafat. 2025. "Kolaborasi Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Di Merauke." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(4):1376–95. doi:10.63822/vmthgf73.
- Halawa, Arnita Niroha, and Dety Mulyanti. 2023. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan Dan Pembelajaran." *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 2(2):57–64.
- Kadarisman, Muh. 2019. "Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kota Depok." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 16(1):17–32. doi:10.31113/jia.v16i1.202.
- KMK, E. Yochanan, SKM, S. Kep, MM, MARS, PIA, Prof Dr Ing H. Soewarto Hardhienata, and Dr H. Eka Suhardi M.Si. 2024. *Kualitas Layanan Dosen Pendidikan di Perguruan Tinggi: Motivasi Kerja, Efektifitas Pelatihan, Komitmen Profesi dan Pemberdayaan Tenaga Pendidik*. Mega Press Nusantara.
- Permana, Rian Sigit Gesang, Chaerul Anam, and Mahmud Sahroni. 2025. "Analisis Strategi Pengembangan Profesional Dosen Di Perguruan Tinggi: Tinjauan Literatur." *Journal of Studies in Educational Management and Research* 1(1):45–49.
- Taryanto, and Suwito Eko Pramono. 2026. "Peningkatan Mutu Pendidikan Sebagai Pilar Utama Peningkatan Daya Saing Nasional Indonesia Di Era Globalisasi." *Business and Investment Review* 4(1). doi:10.61292/birev.231.
- Wardaya, Cep Unang. 2024. "Implementasi Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Di TK Assalam Kota Bandung." *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran* 7(3):1288–1305. doi:10.30605/jsgp.7.3.2024.4409.
- Widyaningtyas, Muhammad Naufal Hisyami Putra, and Mitro Subroto. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12(02). <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/19544>.
- Wijayanto, Budi Prabowo. 2025. *Sinergi Keluarga Dan Sekolah Untuk Motivasi Belajar Anak*. Mega Press Nusantara.
- Yasin, Muhammad, Selfiana Selfiana, and Muhammad Awie Mas'ud. 2024. "Dinamika Interaksi Sosial Siswa Dalam Perspektif Sistem Sosial Di Sekolah." *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)* 2(3):239–52. doi:10.71382/sinova.v2i3.159.